PERUBAHAN ORIENTASI POLITIK KERAJAAN BALANIPA DARI GOWA KE BONE PADA ABAD XVII

Nur Adia[1], Muh. Nuzlul Mubaraq[2], Thursinah Arif Maulana[3]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: sucinuradia.063@gmail.com[1], nuzlulmuhnuzlulmubaraq@gmail.com[2], arif09052018@gmail.com[3]

Received: Month xx, 20xx
Revised: Month xx, 20xx
Accepted: Month xx, 20xx

Abstract

This study aims to analyse the dynamics of the shift in the political orientation of the Balanipa Kingdom from Gowa to Bone in the 17th century as an effort to preserve the kingdom's existence and the survival of its people. This study employs a descriptive qualitative method with historical, sociological, and political approaches. The stages of historical research applied include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, utilising primary sources such as the Lontarak manuscripts and secondary sources such as books and journals. The research findings indicate that each phase of inter-kingdom relations contained strategic values and motives that influenced a kingdom's position. For instance, the initial relationship between Balanipa and Gowa, pioneered by I Manyambungi, fostered a bond of brotherhood and a very strong moral commitment, whilst Balanipa's involvement in the Makassar War affirmed its loyalty to ancestral pledges. However, post-war military pressure forced a peace settlement; the diplomatic surrender of Todani Arung Bakke opened up new avenues for negotiation; and the Salemo II Treaty with Arung Palakka established mutual recognition of equality and shared protection between Bone and Mandar. The implications of this research offer a fresh perspective within local historiography: that shifts in political alliances in the past were not always driven by the opportunism of rulers, but rather constituted a prudent moral response to safeguard human existence and the peace of society from the devastating effects of war.

Keywords: *Balanipa; Bone; Gowa; Political Orientation; Political Strategy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan orientasi politik Kerajaan Balanipa dari Gowa ke Bone pada abad ke-17 sebagai upaya mempertahankan eksistensi kerajaan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Tahapan penelitian sejarah yang diterapkan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan memanfaatkan sumber primer seperti naskah Lontarak dan sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap fase

hubungan antarkerajaan mengandung nilai dan motif strategis yang memengaruhi posisi suatu kerajaan. Seperti hubungan awal Balanipa dan Gowa yang dirintis oleh I Manyambungi menumbuhkan ikatan persaudaraan dan komitmen moral yang sangat kuat, keterlibatan Balanipa dalam Perang Makassar menegaskan kesetiaan terhadap janji leluhur. Akan tetapi, tekanan militer pasca-perang memaksa terjadinya perdamaian; diplomasi penyerahan Todani Arung Bakke membuka ruang negosiasi baru; dan Perjanjian Salemo II bersama Arung Palakka melahirkan pengakuan kesederajatan serta perlindungan bersama antara Bone dan Mandar. Implikasi dari penelitian ini memberikan pandangan baru dalam historiografi lokal bahwa pergeseran aliansi politik di masa lalu tidak selalu didasari oleh sifat oportunis penguasa, melainkan sebuah respons moral yang bijaksana untuk melindungi eksistensi manusia dan kedamaian hidup masyarakat dari dampak buruk peperangan.

Kata Kunci: *Balanipa; Bone; Gowa; Orientasi Politik; Strategi Politik*

Pendahuluan

Secara historis, penduduk Sulawesi Selatan terdiri atas suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Kelompok-kelompok etnis ini merupakan bagian dari ras Melayu atau rumpun bangsa Melayu-Polinesia.[1] Kehidupan politik di Sulawesi pada dasarnya dibangun di atas fondasi kekeluargaan melalui jalur perkawinan politik dan perjanjian persaudaraan yang kemudian mengikat aliansi kerajaan dalam hubungan timbal balik, seperti persekutuan militer Gowa dan Balanipa untuk melawan Bone, begitu pun sebaliknya. Dalam tatanan ini, integritas sebuah kerajaan sering kali diukur dari solidaritasnya terhadap aliansi, di mana upacara kenegaraan dianggap tidak sempurna tanpa kehadiran kerajaan sekutu.[2] Kuatnya ikatan kekerabatan yang telah terjalin sejak lama menjadi fondasi utama bagi Kerajaan Gowa dalam memperluas pengaruhnya di Balanipa secara cepat dan tanpa pertumpahan darah.[3]

Kerajaan Bone dalam kurun waktu abad ke-XVI mampu menjadi salah satu kerajaan besar di Sulawesi yang saling berebut kekuasaan dengan Gowa dan menjadi rival utama Kerajaan Gowa. Pada masa La Ullio Bote'E, Raja Bone ke-V terjadi perjanjian dengan Tu Mapparisi Kallonna Raja Gowa ke-IX yang dikenal dengan Perjanjian Tamalate yang disebut *"Sitettongenna Sudangae Lateriduni"*, yang maknanya persaudaraan yang sederajat yang akan saling menghargai dan membantu dalam kesukaran. Awal mula perjanjian diplomatik antara gowa dengan bone diupacarakan dengan pagelaran senjata di Tamalate. Kunjungan Raja Gowa secara formal ke Bone berhasil menciptakan hubungan bilateral kedua kerajaan. Dengan upacara khidmat, yang memperhadapkan kedua pusaka Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone.[4]

---

[1]Muhlis Hadrawi, *Integrasi Melayu Di Sulawesi Selatan: Kajian Berdasarkan Lontara* (Jakarta: Perpusnas Press, 2020), h. 108.

[2] Bahtiar, 'Hubungan Politik Antarkerajaan: Gowa Dengan Bone, Soppeng, Wajo (TELLUMPOCCO)', *WALASUJI*, 10.2 (2019).

[3]Suardi Kaco H Ardi, 'Parewa Saraq : Institusionalisasi Syariat Islam Di Kerajaan Balanipa-Mandar Abad 17', *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 4.1 (2025), h. 86.

[4]Anzar Abdullah, 'Kerajaan Bone Dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan', *Lensa Budaya: Journal of Cultural Scienses*, 12.2 (2017), h. 20.

Selanjutnya, pada masa La Tenrirawe Bongkangnge Raja Bone ke-VII terjadi peperangan dengan dengan Kerajaan Gowa di bawah kepemimpinan Raja Gowa ke-X yaitu Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng dan saudaranya Karaeng Data Tunibatta Raja Gowa ke-XI. Pada perang ini, Kerajaan Gowa berhasil dipukul mundur oleh Kerajaan Bone.pada masa ini Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya. Akan tetapi, setelah beberapa generasi kemudian Kerajaan Bone mengalami kemerosotan, puncaknya pada masa kepemimpinan La Madaremmeng Raja Bone ke- XIII sebagai sosok raja yang taat agama mengeluarkan kebijakan dalam sistem kerajaan Bone untuk menerapkan syariat Islam dan menghapus kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. hal inilah yang menyebabkan muncul pemberontakan internal yang dikepalai oleh ibunya sendiri yaitu Datu Pattiro yang menentang kebijakan tersebut. Bahkan ibunya sendiri Datu Pattiro bekerja sama dengan Kerajaan Gowa untuk menggulingkan kepemimpinan La Madderemmeng, dari sinilah awal Kerajaan Bone menjadi kerajaan bawahan.[5]

I Manyambungi Raja Balanipa merupakan kemanakan dari istri Raja Gowa I Rerasi, I Manyambungi juga menjadi salah satu orang kepercayaan Raja Gowa. Bahkan I Manyambungi juga dipercaya memimpin pasukan Gowa melakukan ekspedisi ke Pariaman, Sumatra pada tahun 1550. Kepopuleran itu yang membuat para petinggi di Mandar untuk menghadap memohon pada Kerajaan Gowa untuk mengembalikan I Manyambungi untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di Mandar karena kesewenang-wenangan Raja Passokkorang. Sebelum kembali ke Mandar I Manyambungi dan Tu Mapparisi Kallonna pada abad ke-XVI membuat perjanjian yang inti isinya saling membantu ketika susah dan tidak saling menghianati.[6]

Hubungan konfederasi antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa tidak terlepas dari hubungan kekerabatan dan perjanjian leluhur dimasa lalu. Hal inilah yang mengharuskan Balanipa untuk memerangi Kerajan Bone dan Kompeni Belanda dalam membantu Kerajaan Gowa pada Perang Makassar 1667-1669. Setelah Gowa-Tallo dan Balanipa kalah di Perang Makassar, Balanipa tetap bersikukuh untuk tidak tunduk pada Arung Palakka yang mengakibatkan Arung Palakka bersama Kompeni Belanda memerangi Kerajaan Balanipa.[7]

Berdasarkan latar belakang ini, ada tiga studi yang relevan dengan penelitian penulis. Studi Abd. Rahman Hamid (2022)[8], yaitu Kebangkitan Mandar Abad XVI-XVII yang mengemukakan bahwa faktor kebangkitan Mandar adanya hubungan kekerabatan dengan Makassar (Gowa-Tallo) dan pola hubungan seteru dan sekutu antarkerajaan yang relevan dengan penelitian kami, Studi Khaeruddin (2022), Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi hingga Konfrontasi

[5]Khaeruddin, 'Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal Di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII)', *Yupa: Historical Studies Journal*, 6.2 (2022), 111–124.

[6]Arif Husain Usman, 'Hubungan I Manyambungi Di Kerajaan Balanipa Dengan Tumappa'risi Kallona Dari Kerajaan Gowa Pada Abad XVI.' (Universitas Negeri Makassar, 2018).

[7]Rosdiana Hafid, 'Lahirnya Perjanjian Lanrisang Dan Salemo Abad XVII', *WALASUJI*, 8.2 (2017), 351–368.

[8]Abd. Rahman Hamid, 'Kebangkitan Mandar Abad XVI-XVII', *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8.1 (2022), 189–209.

Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII) dan Studi Akhdiari Harpa Dj (2024)[9], Jejak Diplomasi Hukum Nusantara: I Manyambungi dan Adaptasi Sistem Peradilan Gowa di Balanipa. Dari ketiga temuan diatas lebih menitikberatkan hubungan antarkerajaan di Sulawesi dari seteru menjadi sekutu, tetapi kurang membahas posisi Balanipa di dua kerajaan yaitu Kerajaan Gowa dan Bone.

Tinjauan teoritis yang relevan adalah teori diplomasi yang menurut KM. Panikkar dan Sir Earnest Satow yaitu kepandaian yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungan antar negara, teori politik menurut Thomas P. Jenkin[10] ada dua makna yaitu sebagai alat legitimasi moral penguasa dan mekanisme mempertahankan kekuasaan, dan Teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens menyatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh struktur sosial, tetapi juga memiliki kemampuan (agensi) untuk bertindak, mempertahankan, bahkan mengubah struktur melalui tindakannya.[11]

Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan bahwa perubahan hubungan dari permusuhan menjadi persekutuan, khususnya antara Balanipa dan Bone, menunjukkan adanya strategi politik yang tidak semata-mata didasarkan pada loyalitas, tetapi juga pada kepentingan dan kelangsungan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang pola hubungan Gowa-Balanipa dalam memengaruhi interaksi Bone-Balanipa dan perubahan hubungan Balanipa-Bone yang berawal dari musuh menjadi sekutu. Alasan peneliti menggunakan rumusan masalah ini karena peneliti ingin menunjukkan bahwa perubahan aliansi Balanipa bukan sekedar penghianatan terhadap gowa ataupun oportunisme politik, melainkan bentuk survival diplomasi yaitu strategi adaptasi kerajaan kecil dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan struktur kekuasaan pasca Perang Makassar, sebagaimana pada studi yang terkait, disebutkan bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hubungan antar kerajaan secara umum tanpa menempatkan Balanipa sebagai aktor utama dalam dinamika tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru sekaligus memperkaya khazanah historiografi mengenai strategi politik kerajaan pada masa lampau.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis dinamika hubungan politik antara Kerajaan Gowa, Bone, dan Balanipa dalam konteks perubahan orientasi kekuasaan di Sulawesi. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan hubungan Gowa dan Balanipa memengaruhi interaksi Balanipa dengan Bone, juga mengkaji proses perubahan relasi Balanipa dan Bone dari posisi musuh menjadi sekutu.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan ada tiga pendekatan yaitu pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan pendekatan politik. Metode yang peneliti gunakan sesuai dengan metode penelitian

---

[9]Akhdiari Harpa Dj, 'Jejak Diplomasi Hukum Nusantara : I Manyambungi Dan Adaptasi Sistem Peradilan Gowa Di Balanipa', *JISH (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)*, 4.2 (2024), 156–170.

[10]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 44.

[11]Zainal Abidin Achmad, 'Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens', *Jurnal Translitera*, 9.2 (2020).

sejarah yang sistematis, terdiri dari 4 tahapan yaitu, heuristik untuk mengumpulkan berbagai sumber, kritik sumber intern dan ekstern, interpretasi dan historiografi.[12]

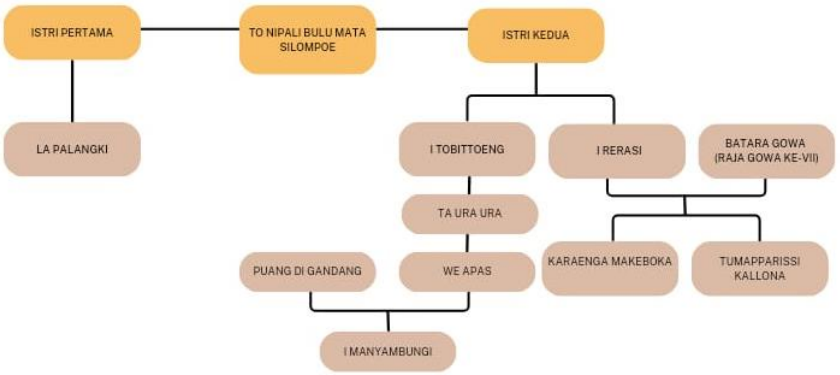
Ada dua jenis sumber yang peneliti gunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer berasal dari manuskrip yaitu naskah *Pattodioloang di Mandar Jilid I dan II, O Diadaq O Dibiasa,* dan *Lontarak Mandar* Dan juga sumber sekunder yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tentang hubungan antar kerajaan Gowa, Bone dan Balanipa.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa

Hubungan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa tidak terlepas dari hubungan kekerabatan dan perjanjian para leluhur. Sistem kekerabatan, yang berakar pada ikatan darah maupun perkawinan, memiliki peran krusial dalam mencerminkan struktur sosial suatu masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh sosiolog Mayer Fortes. Konsep kekerabatan ini tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi meluas membentuk suku yang disatukan oleh kesamaan garis keturunan, baik secara biologis, sosial, maupun budaya. Kuatnya sistem kekerabatan ini dapat dilihat pada sejarah Kerajaan Balanipa dan Kerajaan Gowa. Keduanya memiliki ikatan leluhur yang tidak bisa diabaikan dan telah terjalin bahkan sebelum Kerajaan Balanipa resmi berdiri. Jejak historis ini bermula dari pernikahan Raja Gowa ke-7, Batara Guru (I Pakkeretau), dengan seorang keturunan bangsawan Mandar bernama I Rerasi. Lebih jauh, silsilah Mandar mencatat bahwa I Rerasi memiliki dua saudara yang menetap di wilayah yang berbeda, yaitu I Tabittong yang tinggal di Mandar dan La Palangki Arung Palakka yang menetap di Bone. Ketiga tokoh ini merupakan saudara seayah. Ayah mereka adalah Tonipani Bulu Matasilompoe Manurungnge ri Matajang, yang pernah menjabat sebagai Tomakaka Napo sebelum akhirnya menjadi raja (mangkau) pertama di Bone. Meskipun mereka bertiga adalah saudara seayah, La Palangki lahir dari ibu yang berbeda. Ibu La Palangki adalah seorang Tomanurung (sosok yang dianggap turun dari langit) di daerah Toro, sementara I Rerasi dan I Tabittong lahir dari ibu yang sama.[13]

Silsilah Keluarga I Manyambungi



[12]Wulan Juliani Sukmana, 'Metode Penelitian Sejarah', *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2 (2021), h-2-3.

[13]Usman Ahmad, 'Hubungan I Manyambungi Kerajaan Balanipa Dengan Tumapparisi Kallonna' (Universitas Negeri Makassar, 2015).

Sebelum terbentuk sebagai sebuah kerajaan, wilayah Balanipa terdiri atas empat negeri, yakni Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-todang. Masing-masing negeri dipimpin oleh seorang tomakaka. Keempat wilayah ini kemudian sepakat menyatukan diri dan membentuk persekutuan bernama Appeq Banua Kaiyyang (Empat Negeri Besar). Tujuan utama pembentukan persekutuan ini adalah untuk membangun pertahanan bersama guna menghadapi ancaman ekspansi dari tomakaka wilayah lain, seperti tomakaka Passokkorang, Lenggo, Lempong, dan Tande. Persekutuan dari keempat negeri inilah yang menjadi dasar berdirinya Kerajaan Balanipa.[14]

Ancaman serius dari Tomakaka terhadap wilayah Appe Banua Kayyang (Empat Negeri Besar) memicu krisis keamanan yang membutuhkan intervensi langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, Pappuangan Mosso menjemput I Manyambungi, panglima perang Gowa keturunan Pappuangan Napo. Langkah ini berhasil menghentikan agresi dan mengakhiri dominasi Tomakaka Passokkorang. Secara politis, peristiwa penumpasan ini menjadi tonggak sejarah yang mengawali perubahan struktur kekuasaan lokal, ditandai dengan kemunculan sistem kepemimpinan Mara'dia, di mana I Manyambungi diangkat sebagai Raja Balanipa yang pertama.[15]

Pada saat Kerajaan Balanipa mengalami keadaan sosial yang sangat memprihatinkan maka masyarakat Napo kemudian bermusyawarah untuk menjemput Todilalaing yang saat itu berada di Gowa yang kemudian hari diharapkan menjadi Mara'dia di Balanipa, sesampainya di Gowa para Utusan dari Napo yakni *Appe Banua Kayyang* bertemu dengan I Manyambungi, maka diputuskanlah bahwa Todilalaing harus menghadap karaeng Gowa untuk memohon izin, I Manyambungi menjelaskan bahwa keluarganya datang untuk menjemputnya karena rakyat di Mandar sudah lama mengalami kesengsaraan akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tomakeke di Mandar. Meskipun I Manyambungi pada saat itu, tidak mempunyai bekal yang cukup, ia tetap menyatakan ingin pulang karena ingin memenuhi panggilan dari negerinya, Karaeng Gowa kemudian menganugerahkan pusaka dan harta rampasan perang yang dihasilkan oleh jerih payah I Manyambungi sendiri yang kemudian dibawa berangkat ke Balanipa.[16]

Sebelum I Manyambungi meninggalkan Kerajaan Gowa, terdapat sebuah ikrar yang diucapkan oleh I Manyambungi atas permintaan raja Gowa. Ikrar tersebut disampaikan di hadapan para delegasi persekutuan *Appe Banua Kayyang* serta para pemangku adat Kerajaan Gowa.

> *"Madzondong dzuambongi anna kadae Gowa pessaileo nasangadinna rukka dilalang banua, tanna leleiyo bila'bilang nasangdinna elo dialabemu iddao tia nauwangnga, tettotia Mandar kadaeo di malimang Mandar pessaileo mai diarawiang, kadaeo diarawian pessaileo mai. Mandar dimalimang... Madzondong dzuambongi anna diang mauwang sisalai Gowa-Mandar pamengi anna mupatei, Gowa mauwang, Mandar mappate, Mandar mauwang Gowa mappatei tanna iddana nasisala Mandar-Gowa..."*

---

[14]Syamsu Rijal and others, *Potensi Sejarah Dan Budaya Mandar Dalam Perspektif Pariwisata* (Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2019), h. 33.

[15]Muh. Farrel Islam and Lutfiah Ayundasari, 'Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17 - 18', *Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 6.1 (2021), h. 34.

[16]Azis Syah, *Lontarak Pattodioloang Mandar Jilid 1* (Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja, 1992) h. 37-38

Artinya:

> Besok lusa, manakala Gowa dalam keadaan bahaya, hendaklah engkau datang membantu, kecuali jika bahaya tersebut hanya dalam negeri saja, anda tidak saya harapkan, kecuali kehendakmu sendiri. Demikian juga, jika Mandar dalam bahaya di pagi hari hendaklah segera mungkin memberitahu di sore hari, demikian juga halnya jika kena bahaya di sore hari, hendaklah memberitahu di pagi hari. Besok lusa jika ada orang yang menyatakan Gowa dan Mandar berselisih, cari dan bunuhlah. Jika orang Gowa yang menyatakan demikian, maka Mandarlah yang harus membunuhnya. Jika orang Mandar yang menyatakan demikian, maka orang Gowalah yang harus membunuhnya. Demikianlah pembuktian bahwa Mandar dan Gowa tidak akan berselisih. [17]

Hukum adat pada kerajaan Mandar sebelumnya sangatlah minim akan moral dan etika, dimana penentuan hukuman terhadap laki-laki yang berselish harus dilakukan dengan duel, dan bagi perempuan di uji dengan menyelupkan tangan di dalam air mendidih, praktek ini sangat tidak manusiawi dan dapat mencederai salah seorang yang sejatinya tidak bersalah. Maka kedatangan I Manyambungi dari kerajaan Gowa membawa nuansa baru bagi hukum adat disana, atas pandangan dan kritik I Manyambungi terhadap hukum di Kerajaan Balanipa yang disimak dan diterima baik oleh Puang di Pojosang membuat hatinya terbuka. maka Awal mula revolusi hukum adat ini adalah ketika I Manyambungi memberitahukan kepada Puang di Pojosang bahwa jauh di Kerajaan Gowa cara menentukan salah atau benarnya seseorang yang sedang berselisih adalah dengan melalui beberapa tahapan, diantara yang paling penting adalah dewan hadat disana tidak langsung memberikan hukuman, akan tetapi harus melalui musyawarah dan mufakat pemangku adat. I Puang di Pojosang pun mengutus keponakannya untuk pergi kepada Kerajaan Gowa memohon dan meminta izin untuk dianugrahkan pusaka yang didalamnya terdapat aturan hukum adat dan Rappang Kerajaan Gowa yang nantinya diwariskan dan menjadi cikal bakal hukum adat yang dianut oleh Kerajaan Balanipa secara turun-temurun kepada raja-raja setelah I Manyambungi.[18]

Sejarah panjang mencatat Kerajaan Balanipa yang berhasil menumpas kesewenang-wenangan di tanah Mandar dan kemudian menguatkan pengaruhnnya sebagai pemegang politik tertinggi di tanah itu, hal ini menjadikannya sebagai kerajaan yang memegang peran penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar. Kerajaan Balanipa perlahan menjadi kerajaan yang besar dan disegani hal ini tidak terlepas dari peran I Manyambungi yang mempunyai gagasan untuk mempersatukan seluruh kerajaan yang ada di Mandar dan direalisasikan di masa pemerintahan anaknya yaitu Mara'dia Tomepayung.[19]

Dilema Keberpihakan Balanipa Pasca Perang Makassar (1666-1674 M)

[17]Nur Iqmal, 'Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII', *Jurnal Rihlah*, 4.1 (2016).

[18]Abdul Muthalib and others, *Transliterasi Dan Terjemahan O Diadaq, O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, 1998).

[19] A. M. Mandra and others, *Lontar Mandar*, ed. by Kencana Sembiring (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992).

Ketika Tolombus diberhentikan dari jabatannya sebagai Mara'dia di Balanipa karena tidak dapat bekerja sama dengan dewan pemangku adat, I Daeng Mallari yang dikenal Tomatindo di Buttu diangkat menjadi Mara'dia untuk menggantikan Tolombus, dalam kepemimpinan Mara'dia di Balanipa. I Daeng Mallari berhasil menghimpun dan mempersatukan kembali raja-raja di kerajaan Mandar. Bertepatan pada saat itu, datang utusan dari Gowa bermaksud meminta bala bantuan kepada Mara'dia Balanipa untuk mengirimkan bala bantuan dan membantu kerajaan Gowa bersama-sama melawan serangan yang direncanakan oleh Arungpone dan sekutunya yaitu VOC, bantuan ini diminta oleh Kerajaan Gowa dikarenakan leluhur kerajaan Balanipa dimasa silam mempunyai janji sakral berupa sumpah setia kepada kerajaan Gowa untuk saling menjaga dan membantu ketika salah satu kerajaan tersebut mengalami kesusahan.[20]

Sebelum perang melawan Arung Palakka dengan sekutunya VOC meletus tahun 1667, I Daeng Mallari sempat bertemu dengan Arung Palakka di Pulau Salemo. Keduanya melakukan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan yaitu Perjanjian Salemo yang pada dasarnya berisi ajakan kepada Mara'dia Balanipa untuk bergabung melawan Sultan Hasanuddin. Meskipun pada awalnya I Daeng Mallari sepakat akan ajakan Arung Palakka. Hal ini, justru tidak disambut baik oleh para dewan hadat Balanipa dalam perdebatannya dewan hadat Balanipa menyatakan lebih rela berpisah nyawa dari kepala dibanding mengingkari janji para leluhurnya. Keikutsertaan Kerajaan Pitu Babana Binanga dalam Perang Makassar tahun 1667 berakar dari ikatan lama antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa. Ikatan ini bermula sejak zaman raja pertama Balanipa, I Manyambungi, yang membuat perjanjian dengan Tunipallangga Ulaweng, Raja Gowa ke-10 yang memerintah antara tahun 1546 M dan 1565 M. Oleh karena itu, I Daeng Mallari dengan berat hati harus membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Pembatalan itu membuat Arung Palakka murka dan mencapnya sebagai pengkhianat, hingga akhirnya I Daeng Mallari tewas ditembak Arung Palakka tepat di dahinya sesuai sumpahnya di pulau Salemo. Ia bersumpah di depan Arung Palakka jika ia melanggar perjanjian yang dibuat maka Arung Palakka bisa menembak kepalanya, dan seluruh pasukannya juga ikut gugur bersamanya di medan perang.[21]

Pada November 1669, setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongaya, kompeni Belanda menyatakan sikap tegasnya terhadap kerajaan mandar karena telah menjadi musuh kompeni Belanda dengan sekutunya, maka diberikannya sanksi berupa sikap tegas dari kompeni bahwa kerajaan Mandar tidak akan dianggap serta tidak akan dipedulikan, dalam upaya pemberian hukuman pada Kerajaan Mandar maka dilakukan dalam bentuk serangan militer yang terjadi dalam beberapa tahun mulai dari tahun 1669-1674 M. Meskipun demikian seorang pejuang tangguh dari Mandar yaitu I Magga Daeng Riosok, tetap menyatakan niatnya menentang kompeni Belanda, tetapi karena tekanan luar biasa yang dilakukan oleh belanda bersama Arung Palakka membuat kondisi makin terdesak, masyarakat Mandar mulai mengalami kekurangan sumber daya akibat kerusakan yang disebabkan oleh perang yang berlangsung lama, akhirnya masyarakat mandar pada saat itu banyak yang menderita kelaparan. Atas pandangan Belanda terhadap Mandar yang dianggap menjadi ancaman di masa depan dikarenakan Mandar masih menjadi alternatif pelabuhan perdagangan dan tempat berlindung bagi lawan-lawan kompeni. Oleh sebab itu, pada 29 Agustus 1674 Belanda mengisyaratkan agar

[20] Syah, h. 71-72

[21] Rosdiana Hafid.

mengirimkan kembali pasukannya ke Mandar untuk melakukan penyerangan, tetapi tidak sempat terlaksana, isyarat tersebut ternyata lebih dulu utusan mandar datang ke Makassar untuk meminta maaf dan menerima perdamaian kepada kompeni dan sekutunya. Perjanjian damai pada 10 Oktober 1674 ditandatangani oleh para pembesar kerajaan Balanipa yang saat itu melibatkan Arung Palakka sebagai negosiator antara keduanya.[22]

Setelah pernyataan maaf dari keraajaan-kerjaan mandar maka Arung Palakka Mengundang para pembesar mandar yaitu para Mara'dia yang ada di Kerajaan Mandar, dalam paggilannya Arung Palakka berusaha membujuk semua Kerajaan Mandar untuk menerima tawaran damai dari Belanda, meski diawal Kerajaan Mandar menolak dan tidak ingin bertemu dengan Belanda, akan tetapi karena niat dan itikat yang tulus diperlihatkan oleh Arung Palakka pada akhirnya meluluhkan Mara'dia Mandar.[23]

> Mandar: *"Kami kemari karena Bone dan Soppeng . Kami enggan bertemu Belanda."*
>
> Arungpone (Arung Palakka): *"Saudaraku, tidak perlu takut, kami yang jadi jaminan kepada Belanda. Jika dia mau keris, keris saya yang diambil. Jika mau harta, harta kami yang diambil."*
>
> Mandar: *"Kami menghendaki agar aturan yang berlaku di Karaeng (Gowa) itu pula di Bone yang menjadi pegangan kami. Kami menuntut kehendak kami, kami berbicara menurut cara kami sendiri, dan memakai peraturan kami sendiri."*
>
> Arungpone (Arung Palakka): *"Kusamakan negeri di Bone dengan negeri di Mandar untuk kebaikan bersama. Karena kita sekeluarga, kita sama-sama pengikut Nabi Muhammad. Kita bicara menurut aturan yang berlaku di negeri sendiri. Tidak saling merebut kebesaran, tidak saling merebut kekecilan, tidak saling merebut harta benda, dan tidak menghambat satu sama lain. Saling menanamkan kebaikan, tidak saling mencabut tanam-tanaman, tidak terhasut ucapan orang lain, dan tidak saling menolak. Orang Bone ke Mandar, maka Mandarlah ia. Orang Mandar ke Bone, maka Bonelah ia. Apa yang dikatakan Bone, Mandar percaya; apa yang dikatakan Mandar, Bone percaya. Hanya satu hal, kalau kalian mengangkat raja, supaya kami di Bone juga diberitahu."*[24]

Dalam perjanjian Lanrisang, Mandar telah ditetapkan sebagai kerajaan yang menerima perdamaian dengan Kerajaan Bone dan sekutunya. Akan tetapi, perdamaian itu ternyata masih terlalu dini untuk dipahami sebagai jalan untuk memperoleh kemakmuran di negeri Mandar, karena disamping penerimaan masyarakat Mandar terhadap perjanjian tersebut, Kerajaan Mandar tetaplah disematkan sebagai kerajaan bawahan oleh dominasi kerajaan Bone, hal ini tentu sangat mencederai nilai *siri'* (harga diri) masyarakat Mandar, tetapi walaupun demikian kepatuhan masyarakat Mandar terhadap perjanjian Lanrisang mampu mereda api peperangan dan kehancuran yang lebih struktural akibat tekanan militer Belanda.

Pergeseran Aliansi ke Bone Melalui Perjanjian Salemo II Memperkuat Kedudukan Balanipa (1674–1681)

---

[22]Bahtiar, 'Hubungan Bone Dan Mandar Dari Seteru Menjadi Sekutu', *Balai Pelestari Budaya Sulawesi Selatan*, 2016.

[23]Bahtiar, 'Hubungan Bone Dan Mandar Dari Seteru Menjadi Sekutu', h. 426.

[24]Azis Syah, *Lontarak 2 Pattodioloang Di Mandar*, 1992, h. 84-87.

Sementara itu, Perjanjian Salemo II lahir dari konflik politik dan keluarga. Terjadinya pengejaran terhadap Todani Arung Bakke yang merupakan Raja pada lima kerajaan di wilayah Ajatappareng. Pengejaran tersebut disebabkan karena Toda ni Arung Bakke dianggap melangkahi wewenang Arung Palakka yaitu dengan menjalin hubungan langsung dengan Belanda di Fort Rotterdam tanpa izin dari Arung Palakka. Bahkan, Todani Arung Bakke dengan Belanda memiliki hubungan lebih baik dibandingkan hubungan Arung Palakka dengan Belanda. Perselisihan tersebut diperparah dengan adanya persoalan suksesi di Kerajaan Bone yaitu jika Arung Palakka turun tahta atau meninggal dunia maka akan langsung digantikan oleh kemanakannya sendiri yang bernama La Patau, dikarenakan Arung Palakka tidak mempunyai keturunan. serta retaknya hubungan keluarga antara Todani dan istrinya yang merupakan kerabat Arung Palakka. Karena merasa terancam, Todani melarikan diri ke Balanipa (Mandar) untuk mencari perlindungan. Diantara pembesar Kerajaan Mandar terdapat dua kubu yaitu kubu yang takut memberikan bantuan kepada Arung Bakke dan kubu Yang Bersiap memberikan bantuannya. Awalnya, Orang Balanipa berniat membawa Todani ke Makassar dan berniat singgah di pulau Salemo untuk beristirahat. Akan tetapi, ketika rombongannya singgah di Pulau Salemo, tapi tidak disangka pasukan Arung Palakka sudah menunggu terlebih dahulu dan Todani tertangkap yang akhirnya tewas pada 11 Februari 1681. Tragedi ini sebetulnya bukan Tragedi yang diniatkan oleh Maradia Balanipa tapi dikemudian hari karena jasa Orang mandar yang telah mengantarkan Todani ke Salemo akhirnya diartikan sebagai suatu kebaikan tersendiri bagi Arung Palakka.

Hubungan Mandar dan Kerajaan Bone tidak hanya sampai pada penghargaan Arung Palakka dalam Tragedi Perjanjian Salemo, tetapi berlanjut ketika Arung Palakka menyampaikan Pesannya kepada Kerajaan Balanipa untuk melakukan Ekspedisi ke Kerajaan Luwu. Sebagai bentuk balas jasa kepada Kerajaan Balanipa, Arung Palakka mengadakan pertemuan antara Bone dengan Mandar dan mengikrar suatu perjanjian yang semakin mempererat hubungan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Balanipa. Lahir pula sebuah ungkapan yaitu, "Bone di barat, Mandar di timur; Mandar di barat, Bone di timur". Ungkapan tersebut mengandung unsur sanksi keras terhadap siapa saja yang mencoba menyebarkan perpecahan, serta norma saling melindungi. Selain itu, Warga Bone yang berada di tanah Mandar diperlakukan sebagai orang Mandar dan juga sebaliknya.[25]

Setelah berlangsung suatu perundingan antara pihak Bone dan Mandar, masing-masing pemimpin kembali ke wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, berakhirnya pertemuan tersebut tidak serta-merta mengakhiri hubungan politik yang sedang berkembang di antara kedua kerajaan. Beberapa waktu kemudian, pihak Bone kembali menghubungi para pemimpin Mandar melalui utusan kerajaan untuk menyampaikan suatu kepentingan yang berkaitan dengan rencana ekspedisi militer. Kedatangan utusan tersebut menimbulkan reaksi yang beragam di kalangan bangsawan Mandar. Cara penyampaian pesan yang dianggap tidak sesuai dengan tata penghormatan yang lazim menimbulkan ketersinggungan, namun hal itu tidak sampai memutus hubungan yang telah lama terjalin antara kedua pihak.

Di tengah situasi tersebut, para pemimpin Mandar mengadakan musyawarah untuk menentukan sikap. Pertimbangan utama mereka bukan hanya menyangkut

[25]Hafid, h. 365-366

kepentingan politik sesaat, melainkan juga kewajiban moral untuk menjaga hubungan persahabatan yang telah dibangun sebelumnya. Atas dasar itu, para mara'dia dan pemangku adat sepakat memenuhi permintaan Bone. Persiapan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur kerajaan, mulai dari para bangsawan, pengawal, hingga perlengkapan yang menjadi simbol kebesaran negeri. Keputusan ini menunjukkan bahwa keterlibatan Mandar dalam ekspedisi tersebut dipandang sebagai urusan bersama yang menyangkut kehormatan kerajaan, bukan sekadar bantuan militer biasa.

Ketika pasukan gabungan bergerak menuju wilayah tujuan, mereka menghadapi perlawanan yang jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan. Pertempuran berlangsung sengit dan menyebabkan pasukan Bone beserta sekutunya berada dalam posisi yang sulit. Dalam keadaan demikian, para pemimpin Mandar tetap mempertahankan komitmennya. Sikap ini tergambar melalui tekad untuk tidak meninggalkan medan pertempuran sebelum segala upaya dilakukan. Bagi mereka, mundur tanpa perlawanan berarti kehilangan harga diri yang selama ini dijunjung tinggi. Oleh karena itu, meskipun situasi perang tidak berpihak kepada pasukan sekutu, mereka tetap menunjukkan keberanian dan kesetiaan hingga akhir pertempuran.

Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai salah satu episode penting dalam hubungan antara Mandar dan Bone. Yang diwariskan oleh cerita ini bukan terutama kisah kemenangan atau kekalahan, melainkan nilai-nilai kesetiaan, keberanian, dan tanggung jawab terhadap janji yang telah diucapkan. Dalam pandangan masyarakat Mandar, kehormatan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh hasil perang semata, tetapi oleh kesediaannya untuk tetap berdiri bersama sekutunya pada saat menghadapi kesulitan. Karena itulah kisah ini terus dipelihara dalam tradisi lisan maupun naskah-naskah lokal sebagai pengingat akan pentingnya menjaga martabat dan komitmen dalam kehidupan politik maupun sosial.[26]

Tindakan Balanipa menyerahkan Todani Arung Bakke kepada Arung Palakka bukan sekadar kebetulan sejarah, melainkan manifestasi dari apa yang Sir Ernest Satow definisikan sebagai *"application of intelligence and tact"* yaitu penerapan kecerdasan dan taktik dalam mengelola hubungan antarnegara.[27] Dalam kerangka teori diplomasi K.M. Panikkar, langkah ini merupakan kepandaian mengedepankan kepentingan negara melalui perhitungan strategis yang cermat.

Keputusan Arung Palakka menghapuskan sanksi-sanksi keras dalam Perjanjian Lanrisang dan menggantinya dengan Perjanjian Salemo II dapat dibedah menggunakan kerangka teori politik Thomas P. Jenkin. Jenkin yang menegaskan bahwa kekuasaan negara memiliki kewenangan menggunakan kekerasan fisik, namun hegemoni tersebut hanya akan bertahan lama apabila ditopang oleh legitimasi rasional dan moral.[28] Setelah mengalahkan Gowa dan sekutunya pada Perang Makassar 1674, Arung Palakka menyadari bahwa mempertahankan kekuasaanya melalui penaklukkan militer semata tidak akan efektif dalam jangka panjang. Balanipa dan kerajaan-kerajaan Mandar lainnya memiliki tradisi kemaritiman kuat yang sulit dikontrol sepenuhnya oleh kekuatan darat Bone-Belanda. Lebih dari itu, memaksakan perjanjian yang merendahkan akan menciptakan perlawanan berkelanjutan.

---

[26]Azis Syah, *Lontarak 2 Pattodioloang Di Mandar*, 1992, h. 86-91.

[27]Rendi Prayuda and Rio Sundari, 'Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis', *Journal of Diplomacy and International Studies*, (2019) h. 84

[28]Eva Eviany, *Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya* (Bandung: Cendekia, 2019), h. 47-48

Perkembangan kerajaan Gowa-Tallo setelah perang makassar yang diduduki oleh Arung Palakka beserta sekutunya VOC awalnya banyak menuai kontra dari Kerjaan-Kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, akan tetapi atas niat suci Arung Palakka yang ingin menciptakan ikatan *sempugi* dan bertekad untuk memperkuat tali persaudaraan antara seluruh kerjaan-kerajaan yang ada di Sulawesi pada akhirnya mendapatkan titik terang, satu-persatu kerajaan mulai menyadari dan menerima ajakan Arung Palakka untuk kembali menyatukan aliansi karena sejatinya Arung Palakka hanya mendambakan satu tujuan yaitu ketika semua kerajaan bersatu maka pasti masyarakat sulawesi tidak mudah di adu domba oleh pihak Belanda,Arung palakka tidak membedakan saudaranya dari mandar, kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar pun tidak luput dari ambisi Arung Palakka.[29]

Dalam penelitian ini, Teori Strukturasi Anthony Giddens digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan orientasi politik Balanipa tidak semata-mata ditentukan oleh dominasi Bone dan VOC sebagai struktur kekuasaan regional, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan elite Balanipa sebagai agen politik dalam mengambil keputusan strategis. Tekanan politik pasca-Perang Makassar memang membatasi ruang gerak Balanipa, namun Mara'dia dan dewan adat tetap memiliki agensi untuk bernegosiasi, menyesuaikan diri, dan memilih aliansi yang dianggap paling menguntungkan demi mempertahankan eksistensi kerajaan. Dengan demikian, peralihan orientasi dari Gowa ke Bone dipahami sebagai hasil interaksi antara tekanan struktur dan pilihan rasional aktor politik Balanipa.[30]

Balanipa menghadapi dilema pasca-kekalahan Perang Makassar yaitu tunduk sepenuhnya pada Perjanjian Lanrisang yang membatasi aktivitas ekonomi dan politik kelautan mereka, atau mencari celah untuk mempertahankan kedaulatan. Penyerahan Todani Arung Bakke figur yang dituntut oleh pihak Bone dengan sekutunya VOC menjadi instrumen tawar-menawar diplomatik. Balanipa "membeli" kebebasan dari sanksi Perjanjian Lanrisang dengan menawarkan sesuatu yang bernilai tinggi bagi Arung Palakka yaitu kemenangan dan penyelesaian konflik internal.

Strategi ini menunjukkan bahwa diplomasi Balanipa tidak bersifat reaktif semata, tetapi juga penuh perhitungan untung rugi, siapa yang paling menguntungkan. Mereka memahami bahwa dalam putaran kekuasaan baru pasca Perang Makassar, kelangsungan ekonomi maritim lebih vital daripada hanya sekedar tanda loyalitas kepada sekutu lama dengan Gowa yang sudah melemah. Dengan demikian, teori diplomasi membantu menjelaskan bahwa penyerahan tersebut merupakan siasat bertahan hidup *(survival diplomacy)* yang mengorbankan individu demi kepentingan kolektif kerajaan.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya. Abd. Rahman Hamid (2022) dalam studinya tentang Kebangkitan Mandar Abad XVI-XVII menyimpulkan bahwa faktor kebangkitan Mandar terutama ditopang oleh hubungan kekerabatan dengan Makassar (Gowa-Tallo). Sementara Khaeruddin (2022) menekankan dinamika dari persekutuan diplomasi hingga konfrontasi antarkerajaan secara umum.

Analisis dalam penelitian ini mengembangkan sekaligus membantah temuan tersebut dengan argumen bahwa hubungan kekerabatan tidak terjadi secara begitu saja.

---

[29]Abdul Hamid and Edward Poelinggomang, *Sejarah Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007), h. 150-155.

[30]Achmad, h. 57-58.

Sebaliknya, kekerabatan tidak hanya sekedar perjanjian dan loyalitas yang digunakan tetapi juga sebagai alat hegemoni dan taktik kekuasaan yaitu membangun aliansi dengan Gowa untuk jaminan keamanan dan sebagai alat untuk Kerajaan Gowa begitupula Balanipa, Gowa yang tidak lagi menguntungkan pasca-Perang Makassar, maka Balanipa berubah haluan menunjukkan kemampuan untuk membangun hubungan kekerabatan dengan kekuatan baru dengan Kerajaan Bone. Ini juga dilihat dari Perjanjian Raja Gowa dan I Manyambungi dan Perjanjian Salemo II menciptakan hubungan yang disebut saudara yang difungsikan sebagai alat untuk menguntungkan kedua belah pihak.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai bagian dari proses penelitian sejarah. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan ketersediaan sumber primer, khususnya manuskrip dan naskah lokal yang secara spesifik membahas hubungan politik antara Kerajaan Balanipa dan Kerajaan Bone pada abad ke-17. Kondisi tersebut menyebabkan pembahasan dalam penelitian ini lebih banyak bertumpu pada data dan informasi yang menjelaskan hubungan historis antara Kerajaan Balanipa dan Kerajaan Gowa, mengingat sumber mengenai relasi kedua kerajaan tersebut relatif lebih mudah ditemukan dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, sumber-sumber yang secara langsung menguraikan dinamika hubungan Balanipa dan Bone masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun aksesibilitasnya, sehingga beberapa aspek penting dari hubungan kedua kerajaan belum dapat dikaji secara mendalam dan komprehensif. Keterbatasan sumber tersebut tentu berpengaruh terhadap keluasan analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan masih membuka ruang yang luas untuk dilakukan pengembangan dan pengkajian lebih lanjut.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran orientasi politik Kerajaan Balanipa dari Gowa ke Bone pada abad ke-17 berlangsung bertahap, bukan tiba-tiba. Awalnya, hubungan Balanipa-Gowa terjalin erat melalui kekerabatan dan perjanjian persaudaraan sejak masa I Manyambungi, sehingga Balanipa konsisten mendukung Gowa dalam konflik melawan Bone dan VOC.

Setelah Perang Makassar mengubah keseimbangan kekuasaan regional, Balanipa menyesuaikan posisinya dan mulai membangun hubungan kerja sama dengan Bone bukan sebagai pengkhianatan terhadap Gowa, melainkan respons adaptif terhadap realitas politik baru. Hal ini menunjukkan elite Balanipa mampu membaca situasi dan mengambil keputusan pragmatis, tidak sekadar terikat sentimen historis.

Balanipa bukan objek pasif rivalitas Gowa-Bone, melainkan aktor politik aktif yang mampu membangun, mempertahankan, dan mengubah hubungan diplomatik sesuai kepentingannya sendiri menempatkannya sebagai bagian penting jaringan kekuasaan regional Sulawesi. Balanipa menjadi fokus utama analisis, sekaligus menegaskan bahwa kekerabatan dan perjanjian politik berfungsi tidak hanya simbolis, tetapi juga sebagai instrumen strategis kerajaan lokal untuk bertahan dan bernegosiasi di tengah perubahan politik. Minimnya sumber primer tentang hubungan Bone-Balanipa perlu ditutupi dengan penelitian lanjutan berbasis manuskrip lontaraq, arsip kolonial, dan sumber lokal lain, termasuk kajian dampak perubahan orientasi politik terhadap aspek sosial-ekonomi-budaya masyarakat Mandar.

Daftar Pustaka

Abdullah, Anzar, 'Kerajaan Bone Dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan', *Lensa*

Budaya: Journal of Cultural Scienses, 12 (2017), 15–28

Achmad, Zainal Abidin, 'Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens', *Jurnal Translitera*, 9 (2020)

Ahmad, Usman, 'Hubungan I Manyambungi Kerajaan Balanipa Dengan Tumapparisi Kallonna' (Universitas Negeri Makassar, 2015)

Ardi, Suardi Kaco H, 'Parewa Saraq : Institusionalisasi Syariat Islam Di Kerajaan Balanipa-Mandar Abad 17', *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 4 (2025)

Arif Husain Usman, 'Hubungan I Manyambungi Di Kerajaan Balanipa Dengan Tumappa'risi Kallona Dari Kerajaan Gowa Pada Abad XVI.' (Universitas Negeri Makassar, 2018)

Bahtiar, 'Hubungan Bone Dan Mandar Dari Seteru Menjadi Sekutu', *Balai Pelestari Budaya Sulawesi Selatan*, 2016

——, 'Hubungan Politik Antarkerajaan: Gowa Dengan Bone, Soppeng, Wajo (TELLUMPOCCO)', *WALASUJI*, 10 (2019)

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Dj, Akhdiari Harpa, 'Jejak Diplomasi Hukum Nusantara : I Manyambungi Dan Adaptasi Sistem Peradilan Gowa Di Balanipa', *JISH (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)*, 4 (2024), 156–170

Eviany, Eva, *Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya* (Bandung: Cendekia, 2019)

Hadrawi, Muhlis, *Integrasi Melayu Di Sulawesi Selatan: Kajian Berdasarkan Lontara* (Jakarta: Perpusnas Press, 2020)

Hafid, Rosdiana, 'Lahirnya Perjanjian Lanrisang Dan Salemo Abad XVII', *WALASUJI*, 8 (2017), 351–368

Hamid, Abd. Rahman, 'Kebangkitan Mandar Abad XVI-XVII', *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8 (2022), 189–209

Hamid, Abdul, and Edward Poelinggomang, *Sejarah Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007)

Iqmal, Nur, 'Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII', *Jurnal Rihlah*, 4 (2016)

Islam, Muh. Farrel, and Lutfiah Ayundasari, 'Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17 - 18', *Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 6 (2021)

Khaeruddin, 'Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal Di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII)', *Yupa: Historical Studies Journal*, 6 (2022), 111–124

Mandra, A. M., M. Yusuf K, Hapipa M, Wanyuddin M, and Tabrtaviv M, *Lontar Mandar*, ed. by Kencana Sembiring (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992)

Muthalib, Abdul, Azis Syah, Suradi Yasil, Gunawan, and Gani, *Transliterasi Dan Terjemahan O Diadaq, O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Sulawesi Selatan,

1998)

Prayuda, Rendi, and Rio Sundari, 'Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis', *Journal of Diplomacy and International Studies*

Rijal, Syamsu, Muh. Badollahi Zainuddin, Hilda Anjarsari, and Syamsidar, *Potensi Sejarah Dan Budaya Mandar Dalam Perspektif Pariwisata* (Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2019)

Sukmana, Wulan Juliani, 'Metode Penelitian Sejarah', *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1 (2021)

Syah, Azis, *Lontarak 2 Pattodioloang Di Mandar*, 1992

——, *Lontarak Pattodioloang Mandar Jilid 1* (Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja, 1992)